MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 216/DJMT.1/ST.KP7.1/VII/2024

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Layanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 41/DJMT/KEP/PW1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen dan Layanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Sudiyono, S.H., M.H./ 197012191998031003, Pembina (IV/b), Kasubdit Pembinaan Administrasi Ditbinganismintun;
2. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M./ 198408112009041003, Penata Tingkat I (III/d), Kasi Bimbingan dan Monitoring Ditbinganismintun;
3. Yudo Ari Kasdaroyo/ 197505151999031001, Penata Muda Tingkat I (III/b), Klerek - Pengadministrasi Perkantoran.

Untuk : Melaksanakan tugas untuk Monitoring dan Evaluasi Manajemen dan Layanan Peradilan yang bertempat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 sd. 9 Agustus 2024;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
PLT. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A C H. J U F R I

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara